

BENTUK DAN MAKNA IDIOLOGI EUFEMISME DALAM PIDATO AKHIR MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Fatimatus Zahro^{1}, Sakrim²*

STKIP PGRI Bangkalan, Madura, Indonesia
Pos-el: 2234411008@student.stkippgri-bkl.ac.id
sakrim@stkippgri-bkl.ac.id

Abstract: *This study aims to describe the forms and ideological meanings of euphemisms in President Joko Widodo's final speech. Euphemisms in political speeches are often used as a language strategy to soften statements, build images, and construct certain social realities. This study uses a descriptive qualitative approach with Norman Fairclough's critical discourse analysis method. The research data are in the form of utterances containing euphemisms in President Joko Widodo's final speech. Data collection techniques were carried out through listening and note-taking techniques, while data analysis was carried out through Fairclough's three dimensions of analysis, namely text analysis, discursive practices, and social practices. The results of the study show that euphemisms are used in various lexical forms and phrases to represent policies, achievements, and social conditions more persuasively and constructively. Ideologically, the use of euphemisms functions to build a positive image of the government and direct public perception of the political reality conveyed.*

Keywords: *euphemism, ideological meaning, political speech, critical discourse analysis*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna ideologis eufemisme dalam pidato akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Eufemisme dalam pidato politik kerap digunakan sebagai strategi bahasa untuk menghaluskan pernyataan, membangun citra, serta mengonstruksi realitas sosial tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Data penelitian berupa tuturan yang mengandung eufemisme dalam pidato akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik simak dan catat, sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga dimensi analisis Fairclough, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eufemisme digunakan dalam berbagai bentuk leksikal dan frasa untuk merepresentasikan kebijakan, capaian, serta kondisi sosial secara lebih persuasif dan konstruktif. Secara ideologis penggunaan eufemisme berfungsi membangun citra positif pemerintahan serta mengarahkan persepsi publik terhadap realitas politik yang disampaikan.

Kata kunci: eufemisme, makna ideologi, pidato politik, analisis wacana kritis

Submission : February 3th, 2026

Revision : March 31th, 2026

Publication : April 30th, 2026

PENDAHULUAN

Bahasa dalam ranah politik tidak pernah bersifat netral. Setiap pilihan diksi, struktur kalimat, maupun strategi retorika yang digunakan oleh aktor politik selalu mengandung kepentingan tertentu. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun citra, mempertahankan legitimasi, serta membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, bahasa memiliki kekuatan untuk memengaruhi bahkan mengontrol individu maupun kelompok dalam masyarakat. Yudha Ikhsan (2022) menyatakan bahwa bahasa dapat digunakan

untuk memengaruhi dan bahkan mengontrol individu atau kelompok melalui cara penyampaian pesan yang strategis. Melalui wacana yang diproduksi, seorang pemimpin dapat membingkai realitas sosial, menegaskan keberhasilan, maupun meredam kritik yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, bahasa dalam konteks politik dapat dipahami sebagai praktik simbolik yang berkaitan erat dengan kekuasaan.

Pidato politik merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang memiliki pengaruh luas terhadap opini publik. Dalam pidato, presiden tidak hanya menyampaikan laporan kinerja, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial, ekonomi, dan politik melalui pilihan bahasa yang strategis. Menurut Andri, Okta Hari Mulya, dan Hermendra (2024) pidato merupakan bentuk komunikasi persuasif yang berisi gagasan, ide, dan informasi yang bertujuan memengaruhi audiens sehingga harus disusun dengan bahasa yang efektif dan mudah dipahami. Salah satu strategi kebahasaan yang sering digunakan dalam pidato politik adalah eufemisme. Eufemisme dalam teks berita dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia (Septiana & Rahmawati, 2021).

Menurut Keith dan Kate Burridge (1991), eufemisme merupakan penggunaan ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan istilah yang dianggap kasar, sensitif, atau berpotensi menimbulkan resistensi. Sejalan dengan itu, Andri Azaky dkk. (2024) menjelaskan bahwa eufemisme merupakan bentuk penggunaan bahasa yang lebih halus untuk menjaga perasaan serta menghindari ketidaknyamanan dalam komunikasi. Dalam wacana politik, eufemisme kerap digunakan untuk melunakkan kebijakan yang tidak populer, menyamarkan isu sensitif, atau membingkai persoalan secara lebih positif agar dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, eufemisme tidak hanya berfungsi sebagai alat penghalusan bahasa, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang bersifat ideologis dan persuasif. Penggunaan eufemisme dalam media massa berfungsi untuk menjaga kesopanan dan menyamarkan makna (Septiana, Rahmawati, 2021).

Penggunaan eufemisme menjadi menarik untuk dikaji dalam pidato akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada fase tersebut, pidato presiden memiliki fungsi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus penguatan citra dan warisan politik. Dalam konteks dinamika sosial-politik seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), isu ekonomi, kritik terhadap demokrasi, serta berbagai tantangan nasional, pilihan bahasa yang digunakan presiden berpotensi mengandung strategi pelunakan makna. Ungkapan-ungkapan yang terdengar netral atau positif sering kali merepresentasikan realitas yang lebih kompleks.

Untuk mengkaji fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough (1995). Wacana sebagai sebuah pikiran pokok lengkap yang dinyatakan dalam bentuk lisan atau tulisan (Sakrim, Ulfa, 2021). Perspektif masyarakat terhadap suatu isu sosial dapat dianalisis melalui pendekatan wacana kritis (Miranti & Sudiana, 2021). Dalam perspektif ini, bahasa dipandang sebagai praktik sosial yang tidak terlepas dari ideologi dan relasi kekuasaan. Fairclough menegaskan bahwa teks merupakan bagian dari praktik sosial yang mengandung kepentingan ideologis tertentu. Melalui tiga dimensi analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk eufemisme secara linguistik, tetapi juga menganalisis proses produksi dan pemaknaan wacana serta konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Sementara itu, teori eufemisme Allan dan Burridge digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis eufemisme, seperti *positive euphemism*, *negative euphemism*, *protective euphemism*, *political euphemism*, *understatement*, dan *metaphoric euphemism*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk eufemisme yang direpresentasikan secara tekstual dalam pidato akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta (2) menafsirkan makna ideologis penggunaan eufemisme dalam konteks sosial-politik Indonesia pada periode akhir masa pemerintahannya. Penggabungan kedua kerangka teori tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, di mana teori Allan dan Burridge membantu mengidentifikasi serta mengelompokkan bentuk eufemisme, sedangkan Analisis Wacana Kritis Fairclough mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi di balik penggunaan bahasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik politik serta meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memahami bahasa politik yang digunakan oleh pemimpin negara.

LANDASAN TEORI

Eufemisme adalah penggunaan ungkapan yang lebih lembut atau halus untuk menggantikan kata atau istilah yang dianggap kasar, tabu, ataupun tidak menyenangkan dalam suatu konteks komunikasi. Allan dan Burridge (1991) menjelaskan bahwa eufemisme digunakan sebagai salah satu strategi linguistik yang bertujuan untuk menghindari ungkapan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau menyinggung perasaan dalam interaksi sosial. Seiring dengan perkembangannya, Allan dan Burridge (2006) juga menegaskan bahwa eufemisme tidak hanya berfungsi sebagai alat penghalusan bahasa, tetapi juga berperan dalam melindungi citra serta mengatur persepsi publik. Dalam media sosial, eufemisme berfungsi menjaga kesopanan dalam berpendapat Kusumaningtyas & Triyono, (2023). khususnya dalam komunikasi yang bersifat publik seperti wacana politik. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sholihatin dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan eufemisme dalam media publik memiliki fungsi untuk memperhalus penyampaian pesan, menjadi sarana diplomasi bahasa, serta menjaga citra pihak tertentu dalam situasi komunikasi yang sensitif.

Menurut Mulyasari, Burhanudin, dan Sirulhaq (2020), eufemisme merupakan penggunaan ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dianggap kasar, sensitif, atau kurang pantas dalam penyampaian informasi. Dalam media massa, khususnya pada pemberitaan politik dan hukum di surat kabar, penggunaan eufemisme sering dilakukan untuk menjaga kesantunan bahasa serta menghindari kesan yang terlalu keras terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, wartawan sering memilih kata atau frasa yang lebih halus agar informasi tetap dapat disampaikan dengan baik kepada pembaca. Annur dan Salamah (2024) menyatakan bahwa eufemisme digunakan untuk memperhalus ungkapan yang dianggap tabu dalam komunikasi. Konsep eufemisme tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana menjaga etika komunikasi dalam ruang publik.

Allan dan burridge (1991) mengemukakan bahwa eufemisme dapat diklasifikasikan ke dalam 16 bentuk, di antaranya ekspresi figuratif, metafora, flippancy, remodeling, sirkumlokusi, klipng, akronim, abbreviation, omission, hyperbole, understatement, jargon teknis, kolokial, serta beberapa bentuk lainnya. Klasifikasi tersebut menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai bentuk eufemisme yang muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo. Selain itu, penerapan teori Allan dan Burridge dalam kajian eufemisme juga terlihat dalam penelitian Sutaji dan Nugroho (2019) yang meneliti penerjemahan ungkapan seksual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi bentuk-bentuk eufemisme yang dikemukakan oleh Allan dan Burridge masih relevan dan dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam menelaah berbagai teks kontemporer. Eufemisme digunakan untuk menghaluskan ungkapan dalam karya sastra Syahwardi et al, (2023).

Bahasa yang digunakan dalam wacana politik pada dasarnya tidak bersifat netral, melainkan sering kali merefleksikan kepentingan, ideologi, serta tujuan tertentu dari pihak yang menyampaikannya. Eriyanto (2001) menjelaskan bahwa dalam perspektif analisis wacana, teks dipahami bukan hanya sebagai rangkaian kata atau kalimat, tetapi juga sebagai bentuk praktik sosial yang berkaitan erat dengan relasi kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahasa yang muncul dalam teks dapat menjadi sarana untuk membangun, mempertahankan, Bahasa dalam wacana tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana kekuasaan dan ideologi (Shania, 2023). maupun memengaruhi struktur kekuasaan tertentu. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Azmah, Ansoriyah, dan Mayumi(2024) yang menyatakan bahwa teks politik tidak dapat dilepaskan dari praktik diskursus yang melingkupinya serta kondisi sosiokultural yang menjadi latar belakang kemunculannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks politik perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi proses produksi maupun penyampaian wacana tersebut.

Fairclough menyatakan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membangun legitimasi kekuasaan serta membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial yang ada. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, Analisis wacana kritis digunakan untuk memahami bagaimana media membentuk realitas sosial melalui bahasa (Sari, Setyonegoro, & Priyanto, 2025). bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi semata, tetapi juga sebagai sarana yang dapat memengaruhi pemahaman publik terhadap berbagai isu sosial dan politik. Pendekatan ini

dikembangkan oleh Norman Fairclough yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan relasi kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat. Pendekatan tersebut juga diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Purba, Rahmadani, dan Sari (2024) Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam media memiliki peran yang signifikan dalam membangun norma, nilai, serta konstruksi sosial tertentu di tengah masyarakat. Dengan demikian, bahasa dapat berfungsi sebagai medium yang merepresentasikan sekaligus menyebarkan ideologi kepada khalayak.

Sejalan dengan pandangan tersebut, fenomena bahasa dalam media digital juga dapat dilihat pada penggunaan frasa viral di media sosial. Menurut Pasauran, Dwivayani, Ibrizah, dan Nurliah (2019), frasa viral “Jangan Ya Dek Ya” di media sosial TikTok tidak hanya berfungsi sebagai humor, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial halus yang menyampaikan pesan moral dalam interaksi digital generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa yang beredar di ruang digital tidak sekadar menjadi alat hiburan, melainkan juga memiliki fungsi sosial dalam membentuk perilaku dan pemahaman pengguna media. Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis tidak hanya difokuskan pada identifikasi bentuk-bentuk eufemisme yang terdapat dalam teks, tetapi juga diarahkan pada penafsiran makna ideologis yang terkandung di dalamnya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi kemunculan wacana, khususnya pada periode akhir masa pemerintahan Joko Widodo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena kebahasaan berupa eufemisme dalam pidato politik secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena data yang dianalisis berupa kata, frasa, dan kalimat, bukan angka, sehingga lebih tepat dikaji secara kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan ideologi dan relasi kekuasaan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks pidato akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan data berupa tuturan yang mengandung eufemisme dalam bentuk kata, frasa, maupun kalimat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan teknik simak-catat. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh teks pidato dari sumber resmi, sedangkan teknik simak-catat dilakukan dengan membaca secara cermat, menandai, serta mencatat bagian-bagian yang mengandung eufemisme. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis eufemisme menurut teori Keith Allan dan Kate Burridge, seperti *positive euphemism*, *negative euphemism*, *protective euphemism*, *political euphemism*, *understatement*, dan *metaphoric euphemism*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang meliputi tiga tahap, yaitu analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Analisis teks dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk eufemisme dalam pidato, analisis praktik wacana digunakan untuk memahami proses produksi dan pemakaian teks, sedangkan analisis praktik sosial bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara penggunaan eufemisme dengan konteks sosial, ideologi, dan relasi kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap penggunaan eufemisme secara komprehensif, baik dari segi bentuk maupun makna ideologisnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Makna Idiologi Eufemisme dalam Pidato Akhir Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan gagasan, terutama dalam konteks komunikasi politik. Dalam pidato kenegaraan, pemilihan kata tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun citra, menjaga stabilitas, serta mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang halus dan tidak menyinggung sering kali menjadi pilihan utama bagi seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Salah satu bentuk penggunaan bahasa tersebut adalah eufemisme, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menggantikan kata-kata yang dianggap kurang sopan, kasar, atau berpotensi menimbulkan kesan negatif.

(01)“Saya kemudian berpikir, oh inilah yang menyebabkan yang namanya China/Tiongkok itu melompat maju di 20 tahun terakhir ini dan melampaui negara-negara yang sudah maju, karena yang saya lihat lebih dari separuh mahasiswanya berasal dari Tiongkok.”

Pada kutipan 01 tersebut terdapat bentuk *Metaphoric* (Allan & Burridge, 1991). Ungkapan “Tiongkok melompat maju dalam 20 tahun terakhir” dapat dikategorikan sebagai metaforis menurut pandangan Kate Burridge karena melibatkan pemindahan makna dari ranah konkret ke ranah abstrak. Secara literal, kata “melompat” merujuk pada gerakan fisik tubuh manusia atau makhluk hidup yang berpindah tempat secara cepat dengan tenaga. Namun, dalam kalimat tersebut, subjeknya adalah sebuah negara, yaitu Tiongkok, yang secara logis tidak mungkin melakukan tindakan fisik tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kata “melompat” di sini tidak dimaksudkan secara harfiah, melainkan sebagai cara kiasan untuk menggambarkan sesuatu yang lain.

Dalam kerangka teori metafora Burridge, fenomena ini terjadi karena adanya hubungan antara *source domain* (ranah sumber) dan *target domain* (ranah sasaran). Ranah sumber dalam kalimat ini adalah pengalaman konkret manusia tentang gerakan “melompat”, yang mudah divisualisasikan dan dipahami. Sementara itu, ranah sasarannya adalah konsep abstrak berupa kemajuan ekonomi, teknologi, dan pendidikan suatu negara. Dengan meminjam konsep “melompat”, penutur mentransfer karakteristik seperti kecepatan, lonjakan, dan perubahan drastis ke dalam konsep kemajuan tersebut, sehingga membuatnya lebih mudah dipahami.

Lebih jauh lagi, metafora “melompat maju” juga mengandung makna evaluatif dan penekanan tertentu. Kata “melompat” tidak hanya menunjukkan perubahan, tetapi juga mengisyaratkan bahwa perubahan itu terjadi secara signifikan dan dalam waktu relatif singkat, bukan bertahap atau perlahan. Dalam konteks Tiongkok, hal ini mengacu pada transformasi besar dalam berbagai sektor terutama pendidikan dan sumber daya manusia yang kemudian berdampak pada kemajuan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, metafora ini memperkuat kesan bahwa perkembangan yang terjadi bersifat luar biasa dan bahkan melampaui ekspektasi.

Ungkapan tersebut disebut metaforis karena menggunakan istilah konkret untuk menjelaskan fenomena abstrak melalui proses pemetaan makna, sebagaimana dijelaskan oleh Burridge. Kata “melompat” berfungsi sebagai alat kognitif dan retorik untuk membantu pembaca atau pendengar memahami skala dan kecepatan kemajuan Tiongkok. Inilah ciri utama metafora dalam kajian linguistik bukan sekadar hiasan bahasa, tetapi juga cara berpikir yang memungkinkan manusia memahami realitas yang kompleks melalui pengalaman yang lebih sederhana dan konkret.

(02) “Kita sering lupa karena batubara kita cangkul saja langsung dijual, laku keras, nikel yang sebelumnya juga sama, dicangkul saja ekspor semua, negara lain terima tanpa nilai tambah, bauksit juga dicangkul saja ekspor, semua negara mau mengambilnya, tetapi kita belum memiliki nilai tambah.”

Kalimat 02 Ungkapan “dicangkul saja langsung dijual” dalam kutipan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *understatement* yang termasuk dalam eufemisme menurut kajian Kate Burridge. Eufemisme sendiri adalah strategi bahasa untuk menyampaikan sesuatu yang berpotensi keras, sensitif, atau mengkritik secara tidak langsung dengan cara yang lebih halus. Dalam hal ini, penutur sebenarnya sedang mengkritik praktik eksploitasi sumber daya alam yang kurang memberi nilai tambah, tetapi disampaikan dengan ungkapan yang tampak sederhana dan tidak terlalu tajam.

Kata “dicangkul” berfungsi sebagai simbol aktivitas yang sangat sederhana, bahkan terkesan tradisional dan minim teknologi. Padahal, kegiatan pertambangan batu bara, nikel, dan bauksit melibatkan proses industri besar, alat berat, investasi tinggi, serta jaringan perdagangan global. Dengan memilih kata tersebut, penutur melakukan *downscaling* (pengecilan skala makna), yaitu menggambarkan sesuatu yang kompleks seolah-olah mudah dan instan. Inilah inti *understatement* bukan mengubah fakta, tetapi menyajikan fakta dalam versi yang “diperkecil” sehingga terdengar tidak terlalu serius di permukaan.

Dalam perspektif eufemisme Burridge, strategi ini juga memiliki fungsi pragmatis, yaitu menghindari kesan menyalahkan secara langsung. Jika penutur menggunakan istilah seperti

“eksploitasi besar-besaran tanpa nilai tambah” atau “kegagalan kebijakan hilirisasi”, maka pernyataan tersebut akan terdengar lebih tajam, politis, dan berpotensi menimbulkan resistensi dari pendengar. Sebaliknya, dengan mengatakan “dicangkul saja langsung dijual”, kritik dibungkus dalam bentuk yang lebih ringan dan bahkan sedikit bernuansa sehari-hari. Hal ini membuat pesan lebih mudah diterima, karena tidak terasa seperti serangan langsung, meskipun substansi kritiknya tetap kuat.

Selain itu, understatement di sini juga menciptakan efek retorik tambahan, yaitu ironi halus. Pendengar yang memahami konteks akan menyadari bahwa realitasnya tidak sesederhana “dicangkul”, sehingga muncul kesadaran kritis bahwa ada sesuatu yang “tidak beres” dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, justru karena disederhanakan, makna kritiknya menjadi lebih tajam secara implisit. Inilah kekuatan eufemisme berbentuk understatement menurut Burrige: ia tidak menghilangkan kritik, tetapi menyamakannya dalam bentuk yang lebih halus, sambil tetap memancing pemahaman mendalam dari pendengar.

Ungkapan tersebut termasuk eufemisme berbentuk *understatement* karena menyederhanakan dan mengecilkan realitas yang kompleks dan problematis menjadi gambaran yang tampak biasa saja. Strategi ini sesuai dengan teori Burrige, di mana bahasa digunakan untuk “melunakkan” kritik tanpa menghilangkan makna utamanya. Dengan cara ini, penutur tetap dapat menyampaikan ketidaksetujuan atau keprihatinan, tetapi dalam bentuk yang lebih dapat diterima dan tidak terlalu menyerang secara langsung.

(03) “Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali, kita ini, saya kaget juga kemarin dapat angka ini, Indonesia itu di angka 0,45%, negara tetangga kita Vietnam dan Malaysia sudah di angka 2,43%, negara maju 9,8%, ini masih sangat kurang.”

Pada kalimat 03 “rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 yang masih sangat rendah sekali” dapat dikategorikan sebagai bentuk understatement dalam eufemisme menurut pandangan Kate Burrige. Dalam teori ini, understatement digunakan untuk menyampaikan realitas yang sebenarnya serius atau mengkhawatirkan dengan cara yang lebih halus dan tidak terlalu tajam. Data yang disampaikan menunjukkan kesenjangan besar antara Indonesia (0,45%) dan negara lain seperti Vietnam, Malaysia, bahkan negara maju, tetapi penutur memilih ungkapan “masih sangat kurang” alih-alih menggunakan istilah yang lebih keras seperti “tertinggal jauh” atau “krisis pendidikan tinggi”.

Secara linguistik, frasa “masih sangat kurang” merupakan bentuk pelemahan makna (mitigation). Kata “kurang” sendiri sudah menunjukkan adanya kekurangan, tetapi dalam konteks perbandingan angka yang sangat jauh, istilah tersebut sebenarnya tidak cukup merepresentasikan tingkat keparahan kondisi. Dengan kata lain, realitas yang ada yaitu ketertinggalan signifikan dalam tingkat pendidikan lanjut diperkecil dampaknya melalui pilihan kata yang lebih netral dan tidak konfrontatif. Inilah ciri utama understatement: menggambarkan sesuatu yang besar atau serius seolah-olah lebih ringan.

Menurut Burrige, penggunaan eufemisme seperti ini juga berkaitan dengan fungsi sosial bahasa, yaitu menjaga agar penyampaian kritik tetap dapat diterima oleh audiens. Jika penutur secara langsung mengatakan bahwa kondisi tersebut adalah “kegagalan sistem pendidikan” atau “ketertinggalan parah dibanding negara lain”, maka pernyataan itu akan terdengar lebih tajam dan berpotensi menimbulkan resistensi atau defensif dari pihak tertentu. Dengan menggunakan ungkapan “masih sangat kurang”, kritik tetap disampaikan, tetapi dalam bentuk yang lebih diplomatis dan tidak menyerang secara langsung.

Selain itu, understatement dalam kutipan ini juga menciptakan efek retorik berupa kesadaran implisit. Pendengar yang melihat perbandingan angka (0,45% dibanding 2,43% dan 9,8%) akan menyadari sendiri bahwa kesenjangan tersebut sangat besar, meskipun hanya disebut “kurang”. Di sinilah letak kekuatan eufemisme menurut Burrige bukan menghilangkan makna kritis, tetapi menyampaikan kritik secara tersirat melalui pelemahan ekspresi. Dengan demikian, ungkapan tersebut termasuk eufemisme berbentuk understatement karena mengecilkan tingkat keparahan kondisi nyata sambil tetap mempertahankan pesan kritisnya.

Makna Idiologi Eufemisme dalam Pidato Akhir Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Setiap pilihan kata yang digunakan oleh seorang pemimpin memiliki muatan makna tertentu yang tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat mencerminkan kepentingan, nilai, dan sudut pandang tertentu. Dalam konteks ini, eufemisme tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghalusan bahasa, tetapi juga sebagai strategi diskursif yang berperan dalam membingkai suatu realitas agar lebih dapat diterima oleh public.

(04)SDM unggul akan menjadi kunci.

Pada Kalimat 04 “SDM unggul akan menjadi kunci” merepresentasikan ideologi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai faktor utama dalam kemajuan bangsa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam atau infrastruktur, tetapi terutama pada kualitas manusia yang mengelolanya. Dalam struktur kalimat tersebut, frasa “akan menjadi kunci” mengandung makna prediktif sekaligus normatif. Kata “akan” menunjukkan prediksi atau gambaran tentang masa depan, bahwa kualitas sumber daya manusia diyakini akan sangat menentukan keberhasilan bangsa di masa yang akan datang. Sementara itu, makna normatif muncul karena pernyataan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang seharusnya diupayakan dan dijadikan prioritas. Kata “kunci” berfungsi sebagai metafora yang menggambarkan sesuatu yang menentukan keberhasilan, sebagaimana kunci yang digunakan untuk membuka pintu. Dalam konteks ini, SDM unggul dipandang sebagai faktor penentu yang membuka jalan menuju kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, pernyataan ini tidak sekadar bersifat informatif, tetapi juga membangun keyakinan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang akan menentukan masa depan dan kemajuan suatu negara.

Dalam perspektif Norman Fairclough (1995), bahasa tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral atau sekadar alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Bahasa selalu berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, dan ideologi yang hidup dalam masyarakat. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan cara penyampaian pesan, bahasa dapat merepresentasikan sekaligus membangun cara pandang tertentu tentang realitas sosial. Dengan kata lain, setiap pernyataan atau wacana tidak hanya menggambarkan keadaan, tetapi juga berperan dalam membentuk pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap suatu gagasan atau nilai tertentu dalam praktik sosial. Dalam konteks tersebut, kalimat yang membahas pentingnya SDM unggul menunjukkan adanya ideologi human capital, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai modal utama dalam proses pembangunan. Ideologi ini melihat manusia bukan hanya sebagai anggota masyarakat atau warga negara secara sosial dan politik, tetapi juga sebagai aset produktif yang memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi kemajuan negara. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan melalui berbagai upaya seperti pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, pengembangan kemampuan berpikir inovatif, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya tersebut dipandang penting karena manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi diyakini mampu berpikir inovatif, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya tersebut dipandang penting karena manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi diyakini mampu meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing bangsa. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam wacana tersebut berfungsi untuk membingkai manusia sebagai instrumen strategis yang memiliki peran penting dalam menghadapi dan memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif.

Selain itu, penggunaan kata “unggul” menunjukkan adanya standar kompetitif yang secara tidak langsung menekankan pentingnya kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kata tersebut tidak hanya menggambarkan kemampuan yang baik, tetapi juga mengandung makna superioritas, daya saing, dan kualitas tinggi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia. Dalam konteks ini, istilah “unggul” memberi penekanan bahwa individu tidak cukup hanya memiliki kemampuan dasar, tetapi harus memiliki kompetensi yang lebih maju, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penggunaan kata tersebut, terbentuk suatu pandangan bahwa kualitas manusia harus terus ditingkatkan agar mampu

mencapai standar tertentu yang dianggap lebih baik dan lebih kompetitif. Ideologi yang dibangun dari pernyataan ini adalah bahwa negara harus mampu bersaing dengan bangsa lain melalui peningkatan kualitas individu, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau ekonomi semata, tetapi juga pada pengembangan kemampuan manusia. Dalam situasi globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi, kemajuan teknologi, dan persaingan antarnegara yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan. Selain itu, dalam konteks bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif, peningkatan kualitas individu menjadi semakin penting karena potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pernyataan tersebut memperkuat wacana bahwa kemajuan suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan intelektual, kreativitas, dan inovasi masyarakatnya dalam menciptakan berbagai gagasan dan solusi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi, teknologi, dan kesejahteraan sosial.

Pernyataan ini juga berfungsi sebagai legitimasi kebijakan pendidikan dan penguatan riset. Dengan menyatakan bahwa SDM unggul adalah “kunci”, pemerintah memperoleh dasar diskursif untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, beasiswa, dan pengembangan teknologi. Dalam analisis wacana kritis, hal ini menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun dukungan sosial terhadap arah kebijakan tertentu.

Dengan demikian, secara ideologis kalimat “SDM unggul akan menjadi kunci” merepresentasikan ideologi pembangunan berbasis manusia dan modernisasi. Bahasa dalam pernyataan tersebut tidak hanya menyampaikan gagasan tentang pentingnya pendidikan, tetapi juga membentuk cara pandang publik bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Inilah bentuk konstruksi ideologi dalam praktik sosial sebagaimana dijelaskan oleh Fairclough.

(05) Kita hanya biasanya hanya diberi sekali peluang untuk menjadi negara maju, yaitu saat bonus demografi.

Pada kalimat 05 “Kita biasanya hanya diberi sekali peluang untuk menjadi negara maju, yaitu saat bonus demografi” membangun konstruksi wacana tentang kesempatan yang terbatas dan bersifat mendesak bagi suatu negara dalam mencapai kemajuan. Pernyataan ini menempatkan bonus demografi sebagai momen penting yang tidak selalu terjadi dalam perjalanan suatu bangsa, sehingga keberhasilan memanfaatkannya dipandang sangat menentukan apakah negara tersebut mampu menjadi negara maju atau tidak. Frasa “hanya diberi sekali peluang” menekankan eksklusivitas dan kelangkaan kesempatan tersebut. Secara linguistik, penggunaan kata “hanya” berfungsi sebagai penanda pembatasan yang mempersempit kemungkinan atau pilihan yang tersedia, sehingga memberikan kesan bahwa kesempatan tersebut sangat terbatas. Sementara itu, kata “sekali” semakin menegaskan bahwa peluang itu bersifat tunggal dan tidak akan terulang dalam kondisi yang sama. Dengan demikian, kalimat ini tidak sekadar menjelaskan kondisi demografis yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan usia nonproduktif, tetapi juga membangun cara pandang bahwa momen tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal sebelum kesempatan itu berlalu. Melalui pilihan kata tersebut, kalimat ini menciptakan rasa urgensi kolektif yang mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menyadari pentingnya memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, keterampilan, serta berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung kemajuan bangsa.

Dalam perspektif Norman Fairclough (1995), bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk cara pandang sosial terhadap realitas. Melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan cara suatu gagasan disampaikan, bahasa dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami suatu peristiwa, kondisi, atau fenomena sosial. Dengan demikian, bahasa memiliki kekuatan untuk membangun makna tertentu serta mengarahkan cara berpikir masyarakat terhadap suatu isu yang dibicarakan dalam wacana publik. Dalam konteks tersebut, pernyataan tentang bonus demografi merepresentasikan ideologi pembangunan yang berbasis pada momentum sejarah, yaitu pandangan bahwa terdapat periode

tertentu dalam perjalanan suatu bangsa yang memiliki potensi besar untuk menentukan arah kemajuan di masa depan. Dalam wacana ini, bonus demografi dikonstruksikan sebagai “kesempatan emas” yang memiliki nilai strategis dan sangat menentukan bagi masa depan negara. Istilah tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif bukan sekadar kondisi demografis biasa, tetapi merupakan peluang yang sangat berharga apabila dapat dimanfaatkan secara optimal melalui kebijakan pembangunan yang tepat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan produktivitas masyarakat. Dengan membingkai bonus demografi sebagai peluang tunggal, wacana ini mendorong masyarakat untuk melihat periode tersebut sebagai titik krusial dalam perjalanan negara, yaitu masa yang dapat menentukan apakah suatu bangsa mampu memanfaatkan potensi demografisnya untuk mencapai kemajuan atau justru kehilangan kesempatan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik. Melalui cara penyampaian tersebut, bahasa berperan dalam membangun kesadaran kolektif bahwa momentum bonus demografi harus dipahami sebagai fase penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan bersama dari berbagai pihak.

Selain itu, penggunaan kata ganti “kita” menunjukkan adanya konstruksi identitas kolektif dalam wacana tersebut. Kata “kita” tidak merujuk pada individu tertentu, melainkan mencakup seluruh anggota masyarakat dalam suatu bangsa sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan keterlibatan bersama dalam persoalan yang dibicarakan. Melalui penggunaan kata ganti ini, pembicara menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Dalam konteks ini, ideologi yang dibangun bukan bersifat individual, tetapi nasional, karena yang ditekankan bukan keberhasilan individu semata, melainkan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Seluruh masyarakat kemudian ditempatkan sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab bersama dalam memanfaatkan peluang tersebut, terutama peluang yang muncul dari kondisi bonus demografi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan memanfaatkan kesempatan tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, keterampilan, produktivitas, serta berbagai kontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bahasa yang digunakan dalam pernyataan tersebut juga memperkuat solidaritas sosial, karena kata “kita” menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, bahasa tersebut sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa kemajuan negara adalah tanggung jawab bersama, sehingga pembangunan tidak hanya dipandang sebagai tugas pemerintah, tetapi sebagai hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Dengan demikian, secara ideologis kalimat tersebut membangun narasi urgensi, tanggung jawab kolektif, dan orientasi pada pembangunan berbasis manusia. Bahasa yang digunakan tidak hanya menyampaikan informasi demografis, tetapi juga membentuk keyakinan bahwa masa depan negara sangat ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan momen bonus demografi. Inilah bentuk konstruksi ideologi dalam praktik sosial sebagaimana dijelaskan oleh Fairclough.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap pidato akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ditemukan bahwa penggunaan eufemisme tidak hanya berfungsi sebagai pilihan bahasa yang lebih halus, tetapi juga sebagai strategi diskursif yang sarat dengan kepentingan ideologis. Eufemisme dimanfaatkan untuk membingkai capaian pembangunan secara lebih positif, meredam potensi kritik, serta membangun citra pemerintah yang stabil dan berhasil di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks. Melalui pemilihan diksi tertentu, realitas yang mungkin mengandung kekurangan atau permasalahan disajikan dalam bentuk yang lebih dapat diterima oleh publik, sehingga menciptakan kesan keberhasilan dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, bahasa tidak lagi dipahami sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai sarana konstruksi realitas sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sebagaimana media dan wacana memiliki peran dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu.

Penggabungan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough dengan teori eufemisme Keith Allan dan Kate Burridge memberikan landasan yang kuat untuk mengkaji fenomena tersebut secara komprehensif. Melalui tiga dimensi Fairclough, yaitu teks, praktik diskursus, dan praktik sosial, analisis dapat mengungkap bagaimana bahasa diproduksi,

didistribusikan, dan dikaitkan dengan konteks sosial yang lebih luas. Sementara itu, teori eufemisme membantu menjelaskan bagaimana bahasa digunakan untuk menghindari ungkapan yang sensitif sekaligus menyamarkan realitas dan mengarahkan interpretasi audiens. Dengan demikian, bahasa dalam pidato politik dapat dipahami sebagai alat kekuasaan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk ideologi dan mempengaruhi opini publik.

Oleh karena itu, analisis terhadap eufemisme dalam pidato tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memahami pesan-pesan politik, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menafsirkan makna yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa tersebut.

KONTRIBUSI PENULIS

Fatimatus Zahro berperan sebagai penulis utama yang bertanggung jawab dalam merancang ide penelitian, mengumpulkan serta menganalisis data, dan menyusun keseluruhan naskah jurnal. Sementara itu, **Sakrim** berkontribusi sebagai pembimbing yang memberikan arahan, masukan konseptual, serta melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap isi tulisan untuk memastikan kualitas dan ketepatan ilmiah dari artikel yang dihasilkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, D. R. (2019). Konflik batin tokoh utama dalam novel *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia*, 3(1), 119–129.
- Allan, K., & Burridge, K. (1991). *Euphemism and dysphemism: Language used as shield and weapon*. Oxford University Press.
- Allan, K., & Burridge, K. (2006). *Forbidden words: Taboo and the censoring of language*. Cambridge University Press.
- Azaky, A., Mulya, O. H., & Hermendra. (2024). Eufemisme dalam pidato Soekarno pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia. *Basataka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(2), 688–698. <https://doi.org/10.36277/basataka.v7i2.516>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fatimah, S., Azmah, N., Ansorih, S., & Mayumi, I. (2024). Analisis wacana kritis Fairclough dalam wacana Pilpres 2024 (studi kasus berita di Instagram @pinterpolitik). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 4(2), 45–53.
- Haikal, M. (2024). Analisis eufemisme dalam wacana berita di portal online. *Jurnal Sapala*, 2(1), 92–101.
- Kritis, W., & Norman, M. (2022). Pembungkaman citra polisi pada tagar #PercumaLaporPolisi (analisis wacana kritis). *Acta Diurna: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 217–224.
- M., & Analisis, M. (2021). Pelecehan seksual pada laki-laki dan perspektif kritis Norman Fairclough. *Jurnal Kajian Media*, 7(2), 261–276.
- Mulyasari, T., Sirulhaq, A., & Universitas Mataram. (2020). Penggunaan eufemisme dalam harian Kompas rubrik politik dan hukum. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 3, 80–88.
- Nurhayati, M., & Safitri, A. D. (2022). Fitur leksikal dalam teks pidato kenegaraan Joko Widodo tahun 2020 yang mencerminkan ideologi. *Jurnal Education and Development*, 10(3).
- Purba, A. (2024). Analisis wacana kritis Fairclough dalam teks iklan Sprite 2024. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 2185–2191.
- Sakrim, & Ulfa, M. (2021). Perwujudan kohesi dan koherensi tulisan makalah mahasiswa. *Belajar Bahasa*, 6(1), 83–94.
- Sari, W. P., Setyonegoro, A., & Priyanto. (2025). Analisis wacana kritis Norman Fairclough pada pemberitaan internasionalisasi bahasa Indonesia di media Antaranews.com. *ISOLEK: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, dan Sastra*, 3(1), 366–380. <https://doi.org/10.59638/isolek.v3i1.417>
- Septiana, R. E., Rahmawati, L. E., & Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2021). Implementasi eufemisme dalam berita utama surat kabar Tempo sebagai bahan ajar. *Kandai*, 16(1), 40–50.
- Shania, N. (2023). Inovasi demokrasi dan wacana “my body, my choice” dalam YouTube di Indonesia. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 73–94. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.11>

- Sholihatin, E., et al. (2024). Analisis bentuk dan fungsi eufemisme dalam bahasa tabu pada siniar “Ormas” Deddy Corbuzier. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 119–135.
- Suharya, S., Wardarita, R., & Missriani. (2021). Analisis wacana kritis teks pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. *Jurnal Bindo Sastra*, 5(2), 32–36.
- Sutaji, T. N. A. P., & Nugroho, S. A. (2024). Eufemisme penerjemahan ungkapan seksual novel *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* ke dalam bahasa Inggris. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 14(1), 274–281.
- Syahwardi, S. F., Zahra, F. R., Juansah, D. E., et al. (n.d.). Eufemisme dalam novel *Iyan Bukan Anak Tengah*. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(2), 329–336.